

Lampiran

Instrumen Pertanyaan untuk guru pengajar Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa

1. Bagaimana proses menjadi pengajar mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa?

(Probing: Apakah pernah mengikuti pelatihan pengajaran PSPB? Apakah ada surat tugas atau surat keputusan yang diberikan ketika diangkat menjadi pengajar PSPB)?
2. Bagaimana metode pengajaran yang digunakan untuk mengajar PSPB?
3. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai mata pelajaran PSPB?

(Probing : mengenai materi dalam pelajaran PSPB, pandangan mengenai pemerinth yang mengeluarkan kebijakan PSPB?)
4. Apa hambatan yang dialami selama mengajar PSPB?

(Probing : hambatan yang dialami selama mengajar, baik dalam diri maupun faktor eksternal: sarana prasarana, metode, kebijakan pemerintah/sekolah, murid)
5. Apa tanggapan guru mengenai berakhirnya kebijakan PSPB?

(Probing : dampak berakhirnya PSPB, baik atau tidak untuk pembelajaran PSPB)

Wawancara dengan Warsono

Guru Sejarah SMA N 44 Jakarta

(Mengajar PSPB di SMA N 107 Jakarta)

Jakarta, 26 Juli 2018

Kode Wawancara

Z : Zuhra

W : Warsono

Z : Assalamualaikum pak. Perkenalkan saya Zuhra dari Sejarah UNJ. Saat ini sedang mengerjakan skripsi saya mengenai pengalaman guru mengajar PSPB. Bisa diperkenalkan dulu diri bapak?

W : Nama saya Warsono, lahir tahun 1966 di Indramayu. Saya kuliah di IKIP tahun 1985, saya diangkat jadi PNS 1991. Tidak ada pelajaran yang saya ajari selain sejarah dan waktu Pak Nugroho Notosusanto diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saya mengajar PSPB waktu di SMA N 107 dari awal tahun 90an.

Z : Proses menjadi guru mata pelajaran PSPB?

W : Karena pada saat itu diangkat menjadi guru Sejarah. Sebenarnya kalo sejarah kan mengajarkan soal ilmu, kalau PSPB lebih menekankan pada pembentukan karakter bangsa. Dan itu berbeda, bagaimana sebaiknya. Bukan Sebenarnya. Sebelumnya guru PSPB harus mengikuti pelatihan. Pelatihan kompetensi guru PSPB. Supaya benang merah antara mengajar PSPB dan Sejarah sama

Z : Siapa yang melaksanakan?

W : Dinas Pendidikan dan Kemendikbud

Z : Apakah sama dengan P4?

W : Oh beda, kalo P4 itu pembekalan untuk guru-guru yang akan menjadi PNS. Kalau ini meningkatkan kompetensi guru, bagaimana menjadi guru PSPB yang benar. Bagaimana merencanakan, evaluasi PSPB.

Z : Apakah rutin?

W : Awal saja. Jadi sekolah mengirim guru pengajar PSPB akan mengikuti pelatihan

Z : Durasinya?

W : 4-6 Hari

Z : Apakah diberikan sertifikat/SK?

W : Ada, setiap yang pelatihan dapat pelatihan

Z : Apakah diberikan pelatihan MGMP?

W : Itu wadah untuk meningkatkan kompetensi guru, saya juga mengikuti dan menjadi wadah untuk guru

Z : Kendala mengajar PSPB?

W : Kendalanya harus mengajarkan misi negara. Bukan mengajar sejarah sebenarnya. Jadi saya mengajar yang sebaiknya, dengan tujuan pembangunan bangsa

Z : Apa saja yang diajarkan?

W : Mengenai perjuangan bangsa, dari zaman pergerakan yang heroic

Z : Respon murid-muridnya?

W : Kita tidak hanya sekedar mengajar, kita juga harus sebagai orator membangkitkan semangat siswa dalam belajar dan mengagumi perjuangan bangsa. Misi kita agar kagum dengan perjuangan pendahulu. Tidak hanya mengajar, juga plus plus. Kita harus memotivasi siswa, membakar semangat siswa. Karena itu tujuannya

Z : Metode pengajarannya seperti apa pak?

W : Selain diskusi, sosiodrama, kita liat juga materinya, apakah cukup untuk sosiodrama atau tidak, lalu kita lihat, apakah cocok untuk diskusi. Ada juga Tutor sebaya, jadi murid maju ke depan menceritakan ke teman-temannya mengenai mata pelajaran PSPB. Story telling juga mengenai materi PSPB

Z : Respon murid-murid?

W : Tidak ada masalah, no problem

Z : Mengapa mau menjadi guru PSPB?

W :Karena tugas kepala sekolah. Kemudian sekolah ada kriteria khusus untuk menjadi guru PSPB

Z : Pandanga mengenai PSPB?

W : Sebenarnya bagus dalam meningkatkan nasionalisme, kecintaan dengan negara, meskipun sebenarnya overlapping dengan sejarah. Tapi mungkin ada pertimbangan lain makanya diadakan PSPB

Guru Sosiologi SMA N 78 Jakarta

(Mengajar PSPB pada tahun 1989 hingga berakhir PSPB)

Jakarta, 1 Agustus 2018

Kode Wawancara

Z : Zuhra

H : Hening Pratiwi

Z : Boleh diceritakan kapan mulai mengajar PSPB kapan?

H : Mulai mengajar sejarah di SMA 78 tahun 1989, kemudian mulai mengajar PSPB juga tahun 1989. Selain mengajar di SMA 78, juga mengajar di SMA Regina Pacis swasta.

Z : Mengapa diangkat menjadi guru PSPB?

H : Karena pada saat itu kebetulan mata pelajaran tersebut yang kosong, selain itu guru-guru yang lain juga penuh jamnya. Jadi diminta untuk mengajar PSPB. Sama dengan di SMA Regina Pacis.

Z : Untuk proses pengajaran PSPB, apakah ibu pernah mendapatkan pelatihan mengenai mata pelajaran PSPB?

H : Pelatihan dari pemerintah pernah, sebelum 1995. Pelatihannya dilakukan di MGMP Sejarah DKI Jakarta. Pelatihannya tentang membuat perangkat pembelajaran sejarah. Hanya sekali saja

Z : Apakah ibu pernah mendapatkan pelatihan P4?

H : Tidak ditatar khusus sebagai guru, hanya mahasiswa saja.

Z : Apa yang menjadi hambatan selama mengajar Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa?

H : Materinya sulit dikembangkan, materinya dogmatis, guru menjadi sulit ketika harus improvisasi. Misalnya berbicara G30 S/PKI, atau tentang supersemar, mengenai Perguruan Tinggi di Indonesia. Pada saat itu, ada buku yang menjadi

pengantar dan harus disampaikan ketika mengajar. Judulnya PSPB, karangan Nugroho Notosusanto, berbentuk buku cetak. Untuk bukunya khusus pemerintah.

Z : Apakah memakai buku lain sebagai bahan pengajar? Seperti SNI (Sejarah Nasional Indonesia) atau 30 tahun indonesia merdeka?

H : Iya, tapi hanya sebagai penunjang dan tidak diwajibkan.

Z : Mengajar PSPB sampai kapan?

H : Sampai sekitar tahun 1991, lalu kemudian mengajar Sosiologi

Z : Apakah ada Surat Keputusan khusus sebagai pengajar Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa?

H : Tidak ada, pada saat itu SK hanya sebagai guru sejarah

Z : Apakah ada hambatan sarana dan prasarana ketika mengajar PSPB?

H : Tidak ada, SMA 78 termaksud yang cukup banyak menerima bantuan dari pemerintah

Z : Antusiasme murid antara sekolah swasta dengan sekolah negeri dalam mata pelajaran PSPB?

H : Lebih antusias di negeri. Karena, mereka banyak antusias dan Nem mereka bagus, sehingga masuk sekolah negeri juga sudah terpilih. Sedangkan kalau di swasta karena tidak pake Nem, antusiasnya kurang

Z : Bagaimana cara ibu meningkatkan antusias belajar murid?

H : Diskusi, mengeluarkan masalah-masalah, cerita. Kalau murni dengan hanya penyampaian materi, mereka kurang antusias

Z : Bagaimana sudut pandang mengenai mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa?

H : PSPB seharusnya sudah termaksud saja dalam mata pelajaran sejarah. Seolah-olah melegitimasi pemerintah yang berkuasa. Dan ketika orde baru, menjadi alat legitimasi kalau murid-murid harus menghayati dan paham pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Tapi menurut saya sudah termaksud saja pada sejarah.

Z : Apakah PSPB dapat membantu dalam proses kenaikan jabatan guru mata pelajaran PSPB?

H : Tidak ada dampak mengenai kenaikan jabatan guru. Karena durasi mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa juga hanya sebentar. Pada kurikulum 1994 sudah tidak ada. Tetapi sebenarnya PSPB dapat melengkapi mata pelajaran lainnya. Waktu itu saya buat skripsi mengenai relevansi pokok bahasan sejarah SMA dengan pokok bahasan sejarah IKIP. Jika tidak ada pokok bahasan mengenai mata pelajaran sejarah di IKIP, ada di mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Pada saat itu mata pelajaran sejarah dipisah. Ada sejarah dengan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Waktu peristiwa awal kemerdekaan itu masuk PSPB, sisanya masuk sejarah biasa.

Z : Waktu itu jam mengajar ibu berapa lama?

H : Waktu itu 2 jam, dalam seminggu 2 jam

Z : bagaimana tanggapan ibu dengan dihapusnya mata pelajaran PSPB?

H : Ketika mereka dihapus, dampaknya ada rasa nasionalisme kepada murid. Walaupun mata pelajarannya sudah tidak ada lagi, tapi tujuan dari pembelajaran PSPB tersampaikan kepada murid, walaupun tidak semuanya.

Z : Setelah dihapuskan mata pelajaran PSPB, menurut ibu dengan kondisi saat ini, apakah mata pelajaran PSPB perlu diadakan kembali?

H : dimunculkan kembali, sepanjang tidak berbentrok dan berbenturan dengan mata pelajaran sejarah. Sebenarnya materi sejarah saat ini sudah cukup untuk anak-anak. Jika memang mau dimasukkan, masukkan saja ke mata pelajaran PKN atau sejarah saja. Jangan disendirikan dalam satu mata pelajaran, dan sudah cukup untuk sekarang.

Wawancara dengan Sumarna

Guru Sejarah SMA N 23 Jakarta

(Ketika mengajar PSPB di SMA N 78 Jakarta)

Jakarta, 1 Agustus 2018

Kode Wawancara

Z : Zuhra

S : Sumarna

Z : Assalamualaikum pak. Perkenalkan saya Zuhra dari Sejarah UNJ. Saat ini sedang mengerjakan skripsi saya mengenai pengalaman guru mengajar PSPB. Bisa diperkenalkan dulu diri bapak?

S : Baik. Assalamualaikum, saya Sumarna. Saya mengajar sejarah sudah hampir 20 tahun. Dulu ketika mengajar PSPB saya di SMA N 78, saat ini saya mengajar di SMA N 23 Jakarta. Setelah lulus dari IKIP tahun 92. 6 bulan kemudian saya ngajar honor di SMA N 78 Jakarta, mengajar sejarah. Sejarah budaya dan sejarah umum. Sebenarnya menurut saya, PSPB itu kebijakan politis, tahun 1983. Pak Nugroho pada saat itu mengajukan ke Presiden Soeharto untuk mengenalkan sejarah bangsa. Maka dibuatlah PSPB. Memang, kebanyakan sejarah politik orde baru. Kebanyakan ujung sejarahnya berpihak pada keberadaan pemimpin orde baru. Misalnya peristiwa di Yogyakarta, dan yang paling seru peristiwa G 30 S/PKI. PSPB sangat sejarah politis pada orde baru. Kemudian pak Nugroho Notosusanto ditunjuk jadi mendikbud. Kemudian buku PSPB juga merujuk pada SNI yang dibuat sama kawan-kawannya. Namun pada akhirnya salah satu tim yang buat buku tersebut ada yang mengundurkan diri. Karena tidak pada sejarah yang sebenarnya. Sebenarnya PSPB itu hanya membangkitkan rasa nasionalisme. Ketika belajar, anak-anak disuruh nyanyi lagu-lagu nasional, diskusi mengenai mendukung orde baru. Dan paling penting kedudukan PGRI. Karena pada saat itu ada materi mengenai sejarah PGRI. PGRI sebagai organisasi. Pada saat itu, anak-anak yang mengerti sejarah akan kecewa karena di sejarah itu hal yang sebenarnya gak ditampilkan. Misalnya organisasi Serikat Dagang Islam, berdirinya pada tahun 1906 di Bogor, kemudian tampil lagi pada tahun 1908/1909 gitu. Yang ditonjolkan lebih Budi Utomo. Anak-anak yang kritis ini mempertanyakan. Lalu peristiwa di Yogyakarta, itu sebenarnya idenya Hamengkubuwono IX atau idenya Bapak Soeharto? Kalau di buku kan ditonjolkan perannya Bapak Soeharto sehingga terjadi

pertempuran di Yogyakarta. Kemudian peristiwa G 30 S/PKI. Itu juga masih jadi polemic. Jadi sulit juga, bukan sejarah murni.

Z : Proses jadi pengajar PSPB?

S : Karena langsung dari sejarah, jadi langsung. Kemudian ada penataran P4 bertujuan untuk menekankan nilai-nilai PSPB. Dilaksanakan oleh BP7, yang melakukan penataran Pancasila dengan tujuan mendukung Pemerintah Orde Baru

Z : Apa saja yang diajarkan?

S : Hampir sama. Mengenai Pancasila, kedudukan Pancasila

Z : Alasan akhirnya menjadi pengajar PSPB?

S : Karena saya butuh jam mengajar

Z : Kalau dulu minimal jam mengajar berapa?

S : Minimal 16 Jam. Sebenarnya saya gak setuju sama materi ini sepenuhnya. Tapi sedikit-sedikit menyisipkan materi yang sebenarnya, Namanya baru lulus kan

Z : Hambatan mengajar PSPB?

S : Hambatan biasanya dari anak-anak. Suka bosan. Karena ada sejarah, lalu ada PSPB. Jadinya bertumpuk

Z : Memang bedanya apa?

S : Kontennya, kalo di PSPB menyisipkan konten Orde Baru. Banyak membahas mengenai Orde Baru, kemudian sejarah PGRI. Hal-hal yang seperti itu.

Z : Dampaknya yang bapak rasakan setelah adanya PSPB?

S : Dampaknya sebenarnya seremonial saja. Anaknya jadi semangat

Z : Kalo bapak pribadi?

S : Saya biasa aja. Kalo anak-anak bisa berpidato, berdrama, bercerita mengenai perjuangan bangsa. Setelah itu ya, jadi biasa aja.

Z : Kalau buku yang bapak pakai?

S : Buku yang dipakai ya tentang PSPB. Pengarangnya banyak yang menerbitkan. Kalau buku panduannya dari SNI Jilid 1-VI

Z : Kalau Silabusnya berpatok sama PSPB ya pak?

S :Iya, berpatok sama mata pelajaran PSPB.

Wawancara dengan Iwan Kurniadi

Guru Sejarah SMA Labschool Rawamangun Jakarta

6 Februari 2019

Kode Wawancara

Z : Zuhra

I : Iwan Kurniadi

Z : bisa tolong diperkenalkan pak, nama dan tahun berapa mulai mengajar pspb

I : saya Iwan, masuk SMA labschool tahun 1994 langsung dapat amanah untuk mengajar pspb, sampai dihapusnya pelajaran pspb (lupa tahun berapa)

Z : dihapus pspb tahun berapa pak?

I : terus terang saya lupa

Z : terakhir tahun 1999 dihapus berangsur angsur. Boleh diceritain proses saat disuruh ngajar ngajar pspb itu dapat SK atau seperti apa

I : kebetulan waktu itu diberi amanah untuk mengajar pspb karena guru lamanya berhalangan jadi saya menggantikan. Status saya masih honorer, tahun kedua saya sudah jadi guru tetap dan di SK saya hanya mengajar sejarah, tidak ada penugasan secara spesifik karena pada saat itu lagi proses penghapusan kembali pspb

Z : ngajar pspb kelas berapa aja pak

I : kelas 12 semua program, tahun kedua ditambah mengajar sejarah Indonesia dan dunia.

Z : metode pembelajaran pspb

I : masih klasikal. Ada beberapa metode : ceramah, diskusi dan penugasan. Saya sesuaikan dengan media yang belum sekomplet sekarang

Z : medianya apa saja pak

I : papan tulis, kapur, ohp di plastic transparan

Z : mata pelajaran pspb itu seperti apa

I : pspb merupakan pelajaran sangat penting. Agar Generasi muda memahami betul perjuangan pendiri bangsa.. saya memberikan pemahaman tiga dimensi tanggung jawab , yang pertama bagaimana kemerdekaan itu diperjuangkan, yang kedua kemerdekaan itu dipertahankan, yang ketiga bagaimana kemerdekaan itu diisi. Nah untuk memperjuangkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa. Jadi sangat penting. Apakah masih sangat relevan dengan masa sekarang? Ya masih sangat relevan karena bangsa berdiri ini tidak lepas dari perjuangan

Z : hambatan dalam mengajar

I : hambatannya adalah tumpang tindih materi pelajaran sejarah dan pspb, pengulangan membuat anak menjadi bosan, hal itu merupakan tantangan bagi saya, bagaimana pertemuan di kelas bisa menyenangkan dan tidak membuat bosan.

Z : siasatnya seperti apa pak

I : karena kebetulan di mata pelajaran sejarah saya juga yang mengajar, saya memberikan penugasan bagi materi yang sudah terulang di sejarah atau pspb, termasuk penugasan ke museum, museum perumusan teks proklamasi

Z : efektifkah metode pembelajaran pspb yang disosialisasikan pemerintah ke guru guru sejarah?

I : sangat efektif metode-metode yang dirancang oleh pemerintah, penerapan metode itu supaya lebih menarik siswa misalnya di luar kelas bisa di perpustakaan, atau di museum. Saya pikir metode itu efektif digunakan pada proses pembelajaran saat itu.

Z : dengan metode itu apakah mendorong siswa untuk aktif?

I : aktif. Kelas bisa hidup, karena hidup kelas jadi dinamis , tidak monoton , dan berpengaruh terhadap produktivitas mereka. Akhirnya ketercapaian pemahaman materi terbukti dengan hasil yang mereka peroleh itu sangat relevan

Z : tanggapan tentang tidak adanya pspb, opini bapak seperti apa

I : saya sangat menyayangkan karena pspb merupakan salah satu mata pelajaran yang bisa digunakan untuk selain siswa memahami sejarah perjuangan bangsa juga untuk meningkatkan nasionalisme disamping mata pelajaran yang lain, penataran P4 untuk pancasila sudah dihapuskan, PNP uga berubah menjadi kewarganegaraan, pspb juga dihapus dan saya sangat menyayangkan karena itu sangat bermanfaat

Z : perbedaan pandangan antar materi pspb dari pemerintah dengan menurut ide bapak sendiri

I : jelas ada, materi kontroversi dan banyak sekali di pspb. Saya tidak berpihak ke versi manapun tapi bagaimana saya menjembatani versi itu supaya anak tidak terjebak dalam memilih versi , berpegang kepada consensus secara nasional yang menjadi acuan, masalah nanti ada kontroversi, tidak ditutup kemungkinan untuk membuka ruang diskusi dan itu sangat menarik

Z : selama ngajar pspb ada pelatihan khusus atau penataran mata pelajaran pspb

I : ada penataran di tingkat dki, walikota, ada di kasudin tapi memang tidak sering

Z : keegiatan perbulan ?

I : tidak, incidental

Z : berapa kali penataran

I : kurang lebih 3-4 kali

Z : isi penatarannya seperti apa

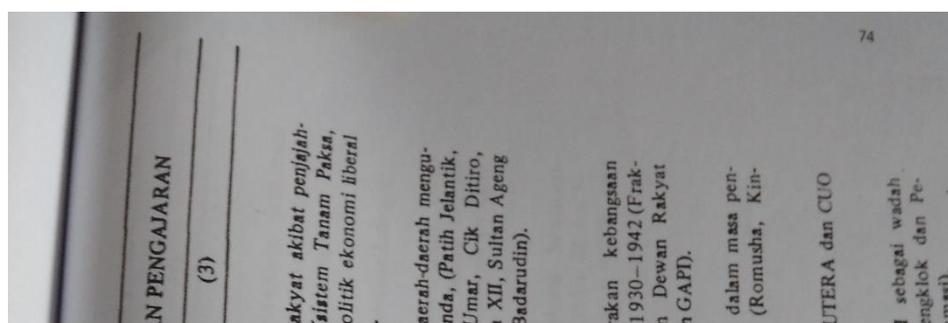
I : sudah tidak ingat, lebih kepada materi

Z : batas waktu mata pelajaran pspb

I : awal peristiwa sekitar proklamasi, sampai pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu, tentang pergerakan nasional tidak ada, berawal dari kekalahan jepang, peristiwa rengasdengklok sampai proklamasi, sampai pembentukan lembaga2 negara, peristiwa heroic, 10 november, perundingan Indonesia dengan belanda

Z : lebih spesifik ke peristiwanya ya pak?

I : iya lebih ke peristiwanya



GAJARAN

ng Proklamasi
klok dan Peru-

Indonesia.

ndang Dasar
itia Persiap-
sia 18 Agus-

Berencana
III dan Pe-
mengisi ke-

PROGRAM, BAHAN PENGAJARAN, METODE, SARANA DAN SUMBER BELAJAR, SERTA PENILAIAN

P R O G R A M		BAHAN PENGAJARAN	METODE	SARANA DAN SUMBER BELAJAR	PENILAIAN
ELAS	SEMESTER				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	I	4	1.1.1. Penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda (sistem Tanam Paksa, Pajak Tanah, Politik Ekonomi Liberal Kolonial Belanda).	Ceramah beragam; Pemberian tugas; Diskusi kelompok.	- Pengamatan. - Laporan.
		4	1.2.1. Perlawanan di daerah mengungsi penjajah Belanda (Patih Jelantik, Nuku, Teuku Umar, Cik Ditiro, Si Singamangaraja XII, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Badarudin).	Ceramah beragam; Pemberian tugas; Diskusi kelompok.	- Pengamatan. - Laporan.
		2	2.1.1. Pertumbuhan gerakan kebangsaan Indonesia periode 1930-1942 (Fraksi Nasional	Ceramah beragam; Diskusi kelompok.	- Pengamatan. - Laporan.

SARANA DAN SUMBER BELAJAR

PENILAIAN

(6)

(7)

- Gambar-gambar tentang kerja paksa (romusha).

- Pengamatan.
- Laporan.

- Pengamatan.
- Laporan.

Buku Paket Sejarah Nasional Indonesia, untuk SMA, jilid 3.
Gambar/foto: Empat Serangkai dan sidang-sidang Cuo Sangi In.
Buku Paket Sejarah Nasional Indonesia, untuk SMA, jilid 3.

Buku Paket Sejarah Nasional Indonesia, untuk SMA, jilid 3.

KRITERIA DAN ASPEK BELAJAR	PENILAIAN
(6)	(7)
- Ket Sejarah Na- donesia, untuk d 3. Tahun Indone- ka. foto: Pembaca- masi dan Upa- era di Pegang- r 56 Jakarta. Tahun Indo- eka. t Sejarah Na- nesia untuk 3. to: Sidang	- Pengamat- an - Laporan. - Pengamat- an - Laporan. - Pengamat- an - Laporan. - Kegiatan

KARANGAN DAN TEMA BELAJAR	PENILAIAN
(6) 30 Tahun Indo- Merdeka. Paket Sejarah Na- l Indonesia, untuk Jilid 3.	(7) - Pengamat- an - Laporan.
r/foto: Sekitar ingan Indonesia- a.	- Pengamat- an - Laporan.
0 Tahun Indone- deka.	- Pengamat- an - Laporan.
r/foto, Gunting- an yang diterbit- da masa Revo- k.	- Pengamat- an - Laporan.
0 Tahun Indone- deka. r/foto: Gedung	- Pengamat- an - Laporan.

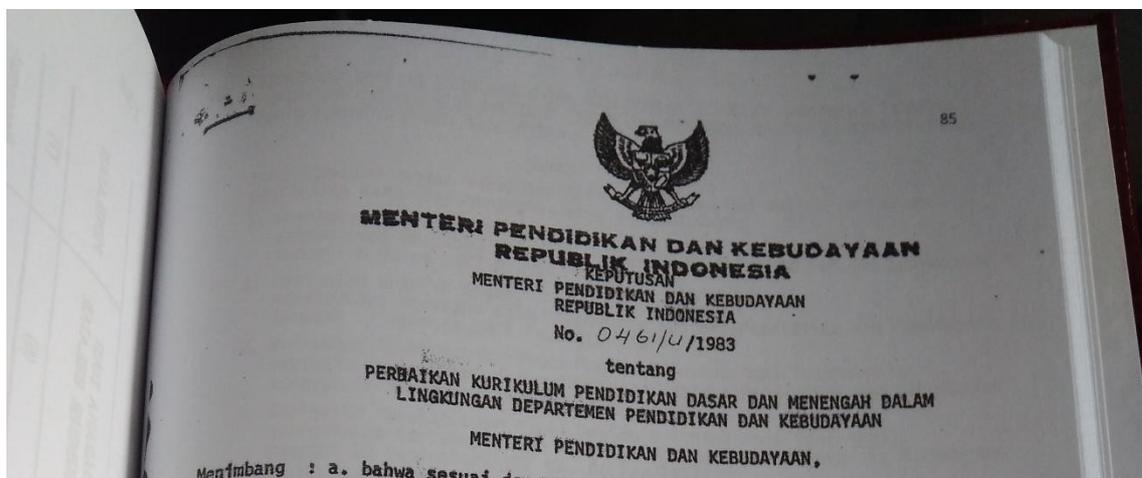
P R O G R A M						
KELAS	SEMESTER	PENJATAHAN WAKTU	BAHAN PENGAJARAN	METODE	SARANA DAN SUMBER BELAJAR	PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2		2	4.3.3. Pembentukan Balai Perguruan Tinggi, "Gajah Mada" dan Universitas "Nasional".	Ceramah bergam; Pemberian tugas.	- Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka. - Gambar/foto: Universitas "Gajah Mada".	- Pengamatan - Laporan.
2		2	4.4.1. Pembentukan Negara-negara boneka ciptaan Belanda menyimpang dari cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945.	Pemberian tugas; Diskusi kelompok.	- Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka. - Peta Indonesia. - Buku Paket Sejarah Nasional Indonesia, untuk SMA, Jilid 3.	- Pengamatan - Laporan.
2		2	4.5.1. Komisi Tiga Negara (KITIN) sebagai usaha P.B.B. untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia Belanda. 5.1.1. Konferensi Asia di New Delhi dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan	Ceramah bergam; Pemberian tugas; Diskusi kelompok; Peragaan gam-	- Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka. - Buku Paket Sejarah Nasional Indonesia, untuk SMA, Jilid 3.	- Pengamatan - Laporan

SARANA DAN SUMBER BELAJAR	PENILAIAN
(9)	(7)
- Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka. - Buku Paket Sejarah Nasional Indonesia, untuk SMA, Jilid 3.	- Pengamatan - Laporan.
- Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka. - Peta Indonesia. - Buku Paket Sejarah Nasional Indonesia, untuk SMA, Jilid 3.	- Pengamatan - Laporan.
- Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka. - Gambar/foto: Universitas "Gajah Mada".	- Pengamatan - Laporan.

SARANA DAN SUMBER BELAJAR	PENILAIAN
(6)	(7)
<ul style="list-style-type: none"> - Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka. - Buku Paket Sejarah Nasional Indonesia, untuk SMA, Jilid 3. - Gambar/Foto: Kegiatan Kesatuan Aksi. - Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka. - Gambar/foto: Kegiatan Monting Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan - Laporan. - Pengamatan - Laporan.
<ul style="list-style-type: none"> - Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka. - Buku Paket Sejarah Nasional Indonesia, untuk SMA, Jilid 3. - Gambar-gambar: Sekitar kegiatan Kesatuan Aksi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan - Laporan.

MATERI BELAJAR	PENILAIAN
(6)	(7)
Tahun Indone- ka. et Sejarah Na- onesia, untuk 13.	- Pengamat- an - Laporan.
Tahun Indone- ka. et Sejarah Na- onesia, untuk 13. ambar.	- Pengamat- an - Laporan.
Tahun Indone- ka. et Sejarah Na- onesia, untuk 13.	- Pengamat- an - Laporan.
Tahun Indone- ka. et Sejarah Na- onesia, untuk 13.	- Pengamat- an - Laporan.

MATERI DAN SIMPULAN BELAJAR	PENILAIAN
(6) 30 Tahun Indone- sria. Paket Sejarah Na- Indonesia, untuk Jilid 3. -gambar: Tanda kekuatan sosial	(7) - Pengamat- an
30 Tahun Indone- sria. Paket Sejarah Na- Indonesia, untuk Jilid 3. -gambar: Seki- -gambar: Seki- 1 Pembangunan 1.	- Pengamat- an - Laporan.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERBAIKAN KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan kurikulum dalam Keputusan ini adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah, yang terdiri dari:

1. Kurikulum Taman Kanak-Kanak, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Maret 1977 No.054/U/1977;
2. Kurikulum Sekolah Dasar, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Januari 1975 No.008c/U/1975;
3. Kurikulum Sekolah Luar Biasa Bagian A (Untuk Anak Tunanetra), sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 September 1977 No.0410/U/1977;
4. Kurikulum Sekolah Luar Biasa Bagian B (Untuk Anak Tunarungu), sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 September 1977 No. 0411/U/1977;
5. Kurikulum Sekolah Luar Biasa Bagian C (Untuk Anak Terbelakang), sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 September 1977 No.0412/U/1977;
6. Kurikulum Sekolah Luar Biasa Bagian D (Untuk Anak Tunadaksa), sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 September 1977 No.0413/U/1977;
7. Kurikulum Sekolah Luar Biasa Bagian E (Untuk Anak Tunalaras), sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 September 1977 No.0414/U/1977;
8. Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Januari 1975 No.008d/U/1975;
9. Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Atas, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Januari 1975 No.008e/U/1975;
10. Kurikulum Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31 Desember 1975 No.0315/U/1975;
11. Kurikulum Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31 Desember 1975 No.0316/U/1975;
12. Kurikulum Sekolah Menengah Industri Kerajinan, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31 Desember 1975 No.0317/U.1975;
13. Kurikulum Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31 Desember 1975 No.0318/U/1975;
14. Kurikulum Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31 Desember 1975 No.0319/U/1975;
15. Kurikulum Sekolah Teknologi Menengah, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31 Desember 1975 No.0320/U/1975;
16. Kurikulum Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31 Desember 1975 No.0321/U/1975;

17.

17. Kurikulum Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Desember 1976 No. 0291/U/1976;
18. Kurikulum Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Desember 1976 No. 0294/U/1976;
19. Kurikulum Sekolah Menengah Musik, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Desember 1976 No. 0295/U/1976;
20. Kurikulum Sekolah Menengah Seni Rupa, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Desember 1976 No. 0297/U/1976;
21. Kurikulum Sekolah Menengah Teknologi Grafika, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Desember 1976 No. 0300/U/1976;
22. Kurikulum Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Desember 1976 No. 0301/U/1976;
23. Kurikulum Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Desember 1976 No. 0302/U/1976;
24. Kurikulum Sekolah Menengah Teknologi Pertanian Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 9 Desember 1976 No. 0303/U/1976;
25. Kurikulum Sekolah Pendidikan Guru, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 Juli 1976 No. 0185/U/1976;
26. Kurikulum Sekolah Guru Olah Raga, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 Oktober 1976 No. 0262/U/1976;
27. Kurikulum Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 Juni 1977 No. 0190/U/1977.

Pasal 2

Mengadakan perbaikan terhadap kurikulum yang mencakup:

- a. peninjauan kembali dan perbaikan komponen kurikulum secara menyeluruh melalui pendekatan pengembangan dengan bertitik tolak pada:
 1. pilihan kemampuan dasar, baik pengetahuan maupun ketrampilan yang perlu dikuasai siswa dalam pembentukan kemampuan dan watak;
 2. keterpaduan dan keserasian antara mata kognitif, psikomotor, dan afektif;
 3. penyesuaian tujuan dan struktur program dengan perkembangan masyarakat, pembangunan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai bidang/program pendidikan yang berdiri sendiri, dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas termasuk pendidikan luar sekolah;
- c. pengadaan program studi baru yang merupakan usaha memenuhi kebutuhan perkembangan di lapangan kerja.

Pasal 3.

Pasal 3

Upaya perbaikan kurikulum berlangsung sampai akhir tahun ajaran 1983/1984 dan menghasilkan kurikulum 1984.

Pasal 4

Sejak tahun ajaran 1984/1985 upaya perbaikan kurikulum secara terus-menerus tetap diadakan dengan bertitik tolak dan mengarah pada pematapan usaha:

- a. pengembangan kurikulum inti dan program khusus bagi kepentingan kelompok tertentu di masyarakat;
- b. penerapan analisis sistem dalam penentuan bidang minat dan sasaran kurikulum;
- c. pengwujudan azas keluwesan dalam isi kurikulum maupun pengelolaan proses belajar-mengajar dalam kerangka pengembangan pengajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- d. kemungkinan penyesuaian sistem dengan kecepatan belajar para siswa secara perorangan ataupun kelompok;
- e. pendekatan program kepada ketuntasan belajar dalam masing-masing bagian maupun keseluruhan program kurikulum;
- f. efisiensi proses belajar;
- g. penerapan konsep berorientasi pada lapangan/bidang pekerjaan dalam kurikulum pendidikan kejuruan;
- h. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan.

Pasal 5

Menugaskan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab utama kegiatan perbaikan kurikulum.

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini termasuk ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28-10-1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Prof. Dr. Nugroho Notosusanto





**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0462/U/1983

tentang

PELAKSANAAN PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA SEBAGAI
BIDANG/PROGRAM PENDIDIKAN YANG BERDIRI SENDIRI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Mengingat* :
- a. bahwa dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara antara lain ditentukan bahwa dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda maka di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta, wajib diberikan pendidikan sejarah perjuangan bangsa;
 - b. bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Oktober 1983 No. 0461 /U/1983 ditetapkan pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai bidang/program pendidikan yang berdiri sendiri, dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas, termasuk pendidikan luar sekolah;
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub b, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaannya.
- Mengingat* :
- a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1983;
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 (Republik Indonesia Negara Bagian) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954;
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 1. Nomor 44 tahun 1974;
 2. Nomor 45 tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
 3. Nomor 45/M tahun 1983;
 - e. Semua Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai kurikulum pendidikan dasar dan menengah;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 dan No. 0222c/0/1980 serta tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983.
- Mendengar* : Saran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan
Keputusan ini;

Menetapkan :

2

Menetapkan : Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai bidang/program pendidikan yang berdiri sendiri pada Kurikulum Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas, serta Pendidikan Dasar dan dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah serta Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Mulai tahun ajaran 1984/1985 Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai bidang/program pendidikan yang berdiri sendiri dilaksanakan pada kurikulum Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas, dan pendidikan luar sekolah dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga.

Pasal 2

Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, sesuai kebijaksanaan yang ditempuh dalam penyempurnaan kurikulum secara menyeluruh, diarahkan pada pembinaan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 dalam rangka memper-tebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, melalui pemilihan materi pendidikan yang secara keseluruhan menggambarkan bangsa Indonesia yang tumbuh berkembang dan berhasil mengatasi tantangan dari luar maupun dari dalam.

Pasal 3

Waktu yang diijatahkan bagi pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dalam kurikulum harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk lembaga pendidikan formal, ditetapkan penjatahan waktu dua jam pelajaran setiap minggu pada masing-masing jenis/jenjang sekolah sebagai bagian dari kurikulum inti;
- b. untuk lembaga pendidikan luar sekolah, penetapan penjatahan waktu akan diatur sesuai kondisi belajar yang berlaku pada lembaga yang bersangkutan.

Pasal 4

Untuk menunjang pelaksanaan kurikulum Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa akan dilakukan:

- a. pengadaan buku pelajaran dan buku bacaan untuk siswa, buku pegangan dan buku petunjuk untuk guru/tutor/fasilitator, serta buku penunjang lainnya; serta
- b. pengembangan dan pengadaan alat/sarana penunjang belajar serta media pendidikan lainnya.

Pasal 5

Untuk mempersiapkan tenaga yang akan melaksanakan dan mengelola pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa mulai tahun ajaran 1983/1984 diadakan persiapan dan pelaksanaan penataran guru, penilik/pengawas, pembina dan pengelola pendidikan dari berbagai jenis/jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 6.

3

91

Pasal 6

Memberi wewenang kepada:

- a. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga,
- untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Prof. Dr. Nugroho Notosusanto





**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0208/U/1984

tentang

PENGATURAN KEMBALI WAKTU DALAM STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SEHUBUNGAN DENGAN DIJADIKANNYA
PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA SEBAGAI BIDANG/PROGRAM
PENDIDIKAN YANG BERTENDIRI SENDIRI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Oktober 1983 No.0462/U/1983 tentang Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Sebagai Bidang/Program Pendidikan Yang Bertdiri Sendiri, dinyatakan:
1. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dilaksanakan mulai tahun ajaran 1984/1985 pada kurikulum TK sampai dengan SMTA, termasuk pendidikan luar sekolah;
 2. Untuk lembaga pendidikan formal, ditetapkan jatah waktu dua jam pelajaran setiap minggu pada masing-masing jenis/jenjang sekolah tanpa menambahkan jam pelajaran pada struktur program kurikulum yang ada;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub a, dipandang perlu mengatur kembali waktu dalam struktur program kurikulum pendidikan dasar dan menengah guna mendapatkan jatah waktu yang diperlukan bagi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa pada masing-masing jenis/tingkat sekolah.

- Mengingat : a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1983;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. Nomor 44 Tahun 1974;
 2. Nomor 45/M Tahun 1983;
 3. Nomor 15 Tahun 1984;
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 11 September 1980 No.0222b/0/1980;
 2. tanggal 11 September 1980 No.0222f/0/1980;
 3. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
 4. tanggal 22 Oktober 1983 No. 0461/U/1983;
 5. tanggal 22 Oktober 1983 No. 0462/U/1983.

Mendengarkan : Saran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGATURAN KEMBALI WAKTU DALAM STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SEHUBUNGAN DENGAN DIJADIKANNYA PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA SEBAGAI BIDANG/PROGRAM PENDIDIKAN YANG BERTENDIRI SENDIRI.

Pasal 1

pengaturan kembali waktu dalam Struktur Program Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan dengan menetapkan bidang/program pendidikan dalam struktur program, yang sebagian waktunya akan diambil untuk melaksanakan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.

Pasal 2

Pengaturan kembali waktu untuk melaksanakan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa bagi masing-masing jenjang dan jenis sekolah adalah sebagai berikut:

1. untuk Taman Kanak-kanak (A, B, dan C), jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambil dari:
 - a. bermain bebas sebanyak 1 (satu) kali pertemuan;
 - b. Pendidikan dan Pemeliharaan Kesehatan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan.
2. untuk Sekolah Dasar (kelas I sampai dengan VI), jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) jam pelajaran.
3. untuk Sekolah Luar Biasa (SLB):
 - a. SLB A:
 - a.1. untuk tingkat Persiapan, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - a.1.1. Bermain Bebas sebanyak 1 (satu) kali pertemuan;
 - a.1.2. Sosio-Medis sebanyak 1 (satu) kali pertemuan;
 - a.2. untuk tingkat Dasar, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) jam pelajaran;
 - a.3. untuk tingkat Karya, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - a.3.1. K1 : Olahraga dan Kesehatan sebanyak 2 (dua) jam pelajaran;
 - a.3.2. K2 : Keterampilan sebanyak 2 (dua) jam pelajaran;
 - a.4. untuk tingkat Lanjutan, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - a.4.1. Matematika sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - a.4.2. Ilmu Pengetahuan Sosial sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - a.5. untuk tingkat Kejuruan, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari Program Kejuruan sebanyak 2 (dua) jam pelajaran.
 - b. SLB B :
 - b.1. untuk tingkat Persiapan, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari Bermain Bebas sebanyak 2 (dua) kali pertemuan;
 - b.2. untuk tingkat Dasar, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) jam pelajaran;
 - b.3. untuk tingkat Lanjutan, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - b.3.1. Bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - b.3.2. Matematika sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
 - c. SLB C:
 - c.1. untuk tingkat Persiapan, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari Kesenian sebanyak 2 (dua) kali pertemuan;
 - c.2. untuk tingkat Dasar, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Per-

- c.2.1. D1-2: Kesenian sebanyak 2 (dua) jam pelajaran;
 - c.2.2. D3-6: Matematika 2 (dua) jam pelajaran;
 - c.3. untuk tingkat Lanjutan, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - c.3.1. L1-2 : Seni Musik/Olahraga sebanyak 2 (dua) jam pelajaran;
 - c.3.2. L3-4 : Keterampilan sebanyak 2 (dua) jam pelajaran.
 - d. SLB C1 :
 - d.1. untuk kelas I - VI, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari Kesenian sebanyak 2 (dua) jam pelajaran;
 - d.2. untuk kelas V - VI, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) jam pelajaran.
 - e. SLB D:
 - e.1. untuk tingkat Persiapan, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari Bermain Bebas sebanyak 2 (dua) kali pertemuan;
 - e.2. untuk tingkat Dasar, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - e.2.1. Bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - e.2.2. Matematika sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - e.3. untuk tingkat Lanjutan, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - e.3.1. Bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - e.3.2. Matematika sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
 - f. SLB D1 :
 - f.1. untuk tingkat Persiapan, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari Bermain Bebas sebanyak 2 (dua) kali pertemuan;
 - f.2. untuk tingkat Dasar, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - f.2.1. Bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - f.2.2. Matematika sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
 - f.3. untuk tingkat Kejuruan, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - f.3.1. Olahraga/Kesehatan dan Mobilitas sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - f.3.2. Kejuruan sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
 - g. SLB E :
 - g.1. untuk tingkat Dasar, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) jam pelajaran;
 - g.2. untuk tingkat Lanjutan, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - g.2.1. Bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - g.2.2. Matematika sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
4. untuk Sekolah Menengah Pertama (kelas I sampai dengan III), jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari Pendidikan Keterampilan sebanyak 2 (dua) jam pelajaran.

5. untuk

- 4
- 95
5. untuk Sekolah Menengah Atas:
 - a. kelas II, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - a.1. Keterampilan Pravokasional sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - a.2. Keterampilan Penunjang Teori sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
 - b. kelas III, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari Keterampilan Penunjang Teori sebanyak 2 (dua) jam pelajaran.
 6. untuk Sekolah Pendidikan Guru:
 - a. Jurusan Sekolah Dasar:
 - a.1. untuk kelas I, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - a.1.1. Kesenian sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - a.1.2. Keterampilan sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - a.2. untuk kelas II, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - a.2.1. Bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - a.2.2. Metodik Khusus sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - a.3. untuk kelas III, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - a.3.1. Bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - a.3.2. Administrasi Sekolah sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - b. Jurusan Taman Kanak-kanak:
 - b.1. untuk kelas I, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - b.1.1. Kesenian sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - b.1.2. Keterampilan sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
 - b.2. untuk kelas II, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - b.2.1. Kesenian sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - b.2.2. Keterampilan sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
 - b.3. untuk kelas III, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - b.3.1. Kesenian sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - b.3.2. Keterampilan sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
 7. untuk Sekolah Olahraga:
 - a. kelas I :
 - a.1. untuk semester I, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - a.1.1. Kesehatan/UKS dan Metodik sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - a.1.2. Permainan dan Metodik sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
 - a.2. untuk semester 2, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - a.2.1. Atletik dan Metodik sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - a.2.2. Permainan dan Metodik sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
 - b. kelas II...

- b. kelas II :
- b.1. untuk semester 3, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - b.1.1. Kesehatan/UKS dan Metodik sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - b.1.2. Pengetahuan Umum Olahraga sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
 - b.2. untuk semester 4, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - b.2.1. Keterampilan/UKS dan Metodik sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - b.2.2. Metodik Pengetahuan Umum Olahraga sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
- c. kelas III:
- c.1. untuk semester 5, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari:
 - c.1.1. Pengetahuan Umum Olahraga sebanyak 1 (satu) jam pelajaran;
 - c.1.2. Permainan dan Metodik sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
 - c.2. untuk semester 6, jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari Keterampilan Mengajar Olahraga dan Kesehatan sebanyak 2 (dua) jam pelajaran.
8. untuk Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa:
- a. kelas I : jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari Keterampilan sebanyak 2 (dua) jam pelajaran;
 - b. kelas II: jatah waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diambilkan dari Praktek Keguruan sebanyak 2 (dua) jam pelajaran.
9. untuk SMTA Kejuruan, pengaturan kembali waktu untuk Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa disesuaikan dengan keadaan masing-masing-jurusan dengan memperhatikan ketentuan tersebut pada pasal 1.

Pasal 3

Ketentuan tersebut pada pasal 2 berlaku untuk tahun ajaran 1984/1985, dengan catatan mulai tahun ajaran 1985/1986:

1. kelas yang telah menggunakan kurikulum 1984 melaksanakan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atas dasar Struktur Program baru;
2. kelas yang masih menggunakan kurikulum 1975/1976/1977 tetap melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal 2.

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Mei 1984





MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 025/P/1985

tentang

Tim Penyusun Buku Teks Pendidikan Sejarah Perjuangan
Bangsa Dan Pendidikan Sejarah Nasional Indonesia

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Meningkat : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Oktober 1983 No. 0461/U/1983 dan tanggal 22 Oktober 1983 No. 0462/U/1983 telah ditetapkan masing-masing tentang Perbaikan Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan dan Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Sebagai Bidang/Program Pendidikan Yang Berdiri Sendiri ;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Mei 1984 No. 0208/U/1984 telah ditetapkan tentang Pengaturan Kembali Waktu Dalam Struktur Program Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah Sehubungan Dengan Dijadikannya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Sebagai Bidang/Program Pendidikan Yang Berdiri Sendiri ;
- c. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Mei 1984 No. 0209/U/1984 jo. tanggal 25 Oktober 1984 No. 0486/U/1984 telah ditetapkan masing-masing tentang Perbaikan Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0209/U/1984 ;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub a, b dan c di atas, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Buku Teks Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Dan Pendidikan Sejarah Nasional Indonesia.
- Mengingat : a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 ;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. Nomor 44 Tahun 1974 ;
2. Nomor 45/M Tahun 1983 ;
3. Nomor 15 Tahun 1984 ;
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 Januari 1975 No. 008c/U/1975 ;
2. tanggal 17 Januari 1975 No. 008d/U/1975 ;
3. tanggal 17 Januari 1975 No. 008e/U/1975 ;
4. tanggal 11 September 1980 No. 0222d/O/1980 ;
5. tanggal 11 September 1980 No. 0222e/O/1980 ;
6. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983 ;
7. tanggal 22 Oktober 1983 No. 0461/U/1983 ;
8. tanggal 22 Oktober 1983 No. 0462/U/1983 ;
9. tanggal 2 Mei 1984 No. 0208/U/1984 ;
10. tanggal 2 Mei 1984 No. 0209/U/1984 ;
11. tanggal 25 Oktober 1984 No. 0486/U/1984.

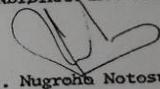
MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Membentuk "Tim Penyusun Buku Teks Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Dan Pendidikan Sejarah Nasional Indonesia", selanjutnya dalam Keputusan ini disebut "Tim" yang bertugas menyempurnakan kurikulum dan pedoman pelaksanaannya serta melaksanakan penulisan buku pelajaran dan buku pengangan guru dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas.
- Kedua : Susunan keanggotaan Tim adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya memberi wewenang kepada Ketua Tim membentuk Sekretariat dan mengangkat staf Sekretariat menurut keperluan.
- Keempat : Ketua Tim wajib menyampaikan laporan kemajuan setiap bulan dan hasil pelaksanaan tugasnya secara keseluruhan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya pada akhir Maret 1985.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran 09.1.03.586608.23.03.01. dari Proyek Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) Jakarta tahun 1984/1985.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 1985

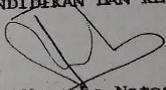
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,


Prof. Dr. Nugroho Notokusanto

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 24 Januari 1985 No. 025/P/1985

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Prof.Dr. Ny. Conny Semiawan | - sebagai Ketua merangkap penulis ; |
| 2. Dra. Darmiasti | - sebagai Sekretaris I ; |
| 3. Dra. Yuke Indrati | - sebagai Sekretaris II ; |
| 4. Drs. Tanu Suherly | - sebagai penulis ; |
| 5. Agus F. Tangyong, MA | - sebagai penulis ; |
| 6. Drs. S. Belen | - sebagai penulis ; |
| 7. Drs. Yusmar Basri | - sebagai penulis ; |
| 8. Drs. Ariwiadi | - sebagai penulis ; |
| 9. Drs. L.J. Moleong, MA | - sebagai penulis. |

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,


Prof. Dr. Nugroho Notosusanto

KOMPAS - RABU, 18 SEPTEMBER 1985 HALAMAN 12

Pimpinan DPR Pernah Bicarakan Pelurusan PSPB tetapi Mampat

Jakarta, Kompas

Pimpinan MPR/DPR pada tahun 1984 pernah melakukan peninjauan untuk meluruskan materi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dengan pemerintah, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Demikian Ketua MPR/DPR, H Amirmachmud Selasa kemarin menjawab wartawan sekitar kontrol penyusunan buku PSPB karya Prof Dr Nugroho Notosusanto (almarhum).

Sementara itu sumber Kompas mengungkapkan, peninjauan untuk meluruskan PSPB tersebut dilakukan oleh pimpinan dewan dengan pemerintah yang diwakili Menteri P dan K. "Tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan pimpinan dewan, sehingga masalahnya mampat," ia menjelaskan.

Menurut Amirmachmud, penulisan sejarah perjuangan bangsa harus dilakukan dengan tertib, jujur dan benar. Kalau penyusunnya mengungkapkan hal-hal yang tidak benar harus dikoreksi.

Selanjutnya bekas Menteri Dalam Negeri itu mengingatkan, tekad Orde Baru mengoreksi total segala bentuk penyelewengan yang terjadi semasa pemerintahan Orde Lama. Atas landasan pengalaman sejarah ini, Orba tidak ingin di kemudian hari dikoreksi oleh generasi penggantinya.

Dikatakan, mengoreksi hal-hal yang salah adalah wajar. Begitu pula seandainya Departemen P dan K sekarang ini menrencanakan melakukan penelitian kembali penyusunan PSPB. "Ini pun termasuk hal yang wajar," ujarnya sembari tersenyum cerah. (os)

... JUMAT, 16 SEPTEMBER 1983 HALAMAN 6

Bahan dan Metode Pengajaran Baru Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

Jakarta, Kompas
 Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) secara resmi akan dimulai tahun ajaran 1984/1985. Di dalamnya tercakup bahan dan metode pengajaran yang baru, sebagai pengganti pelajaran sejarah Indonesia yang selama ini masih digunakan.

Selama tahun ini akan dilakukan uji coba sekaligus mengadakan penataran guru dari TK sampai SMTA se-Indonesia. Diharapkan buku guru yang baru itu bisa disebar luaskan mulai 4 Oktober mendatang. Demikian keterangan sumber Kompas pada Mendikbud, Kamis kemarin.

Saat ini buku pelajaran PSPB tengah dalam proses pencetakan setelah mengalami penyederhanaan bahasa. Dengan demikian bahasa yang disajikan bisa dipahami oleh setiap guru, kota maupun di daerah.

"Penyederhanaan dilakukan oleh ahli bahasa. Dan masalah penyederhanaan masih merupakan percobaan, diharapkan juga bisa terlaksana sebagaimana mestinya," ungkap sumber tadi.

Gebrakan

Penataran dilakukan selama setahun ini untuk seluruh guru TK sampai SMTA. Diharapkan selama setahun ini seluruh guru sudah tertatar. Bersamaan dengan itu, juga dilakukan uji coba selama periode yang sama.

"Ini suatu gebrakan. Dalam penataran itu akan dikemukakan metode spiral dalam menyampaikan pelajaran. Dengan demikian bagi afektif yang menjadi

masalah utamanya bisa teratasi," tuturnya.

Dalam metode spiral bahan pelajaran akan mulai dari daerah dulu disertai dengan penampilan beberapa nama tokoh pahlawan. Kepada guru, selama penataran, akan diberikan bekal bagaimana menyeleksi sejumlah nama tokoh pahlawan yang akan ditampilkan. "Ini merupakan inti dari metode itu sendiri," kata sumber itu.

Usaha pendekatan lewat metode ini, diharapkan mempunyai dampak yang lebih luas bagi anak didik setempat. Terutama dalam memilih tokoh-tokoh yang bisa ditampilkan kepada anak didik. Dari keadaan ini sangat diharapkan, anak didik mempunyai rasa keterlibatan nasional, yaitu dalam daerahnya tidak pernah ada tokoh pejuang.

"Contoh yang paling gampang yaitu kasus ditembaknya pesawat penumpang milik Korea Selatan. Kita tidak mengalami, tetapi kita merasa ikut terlibat dan ikut merasakan apa yang menjadi keprihatinan mereka," tambahnya.

Lewat penataran itu pula, akan disampaikan bagaimana usaha mengembangkan dan mengolah, sehingga anak didik merasa tertarik dan mampu memberikan tanggapan yang aktif dan total terhadap tantangan yang diperoleh dari sejarah.

Membosankan

Sejauh ini pelajaran sejarah memang terasa membosankan. Pelajaran yang diberikan tidak lebih dari menghafal nama dan tahun semata. Sehingga kurang terasa perbedaan tingkat ajaran yang harus diberikan kepada anak SD sampai SMTA.

Melihat keadaan ini, Prof Dr Nugroho Notosusanto ketika diangkat sebagai Mendikbud bertekad mengubah pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah seharusnya tidak hanya mengandalkan segi kognitif semata tetapi lebih kepada afektif. Karena itulah, kepada Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk segera mengadakan revisi buku pelajaran sejarah. (top)

102

KOMPAS - RABU, 26 OKTOBER 1983 HALAMAN 9

Pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa Mulai 1984

Jakarta, Kompas

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) akan dimulai pada tahun ajaran 1984/1985. Ia menjadi bidang program pendidikan yang berdiri sendiri, dilaksanakan pada kurikulum lembaga pendidikan formal dan nonformal. Demikian keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Nugroho Notosusanto No 0462/U/1983.

Jatah waktu untuk pelajaran PSPB dalam lembaga pendidikan formal (TK, SD, SMP, SMTA) sebanyak dua jam pelajaran tiap minggu. Pelajaran ini diajarkan pada masing-masing jenjang sekolah sebagai bagian dari kurikulum inti.

Sementara itu untuk pelajaran PSPB dalam lembaga pendidikan nonformal, penjatahan waktu pelajaran PSPB diatur sesuai kondisi belajar lembaga yang bersangkutan. Lembaga pendidikan nonformal ini dikelola oleh Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga.

Buku

Untuk keperluan pelaksanaan PSPB, diadakan buku pelajaran dan buku bacaan bagi siswa. Selain itu, diadakan pula buku pegangan dan buku petunjuk bagi para guru, tutor, fasilitator serta buku penunjang lainnya.

Di samping itu dikembangkan

dan diadakan alat/sarana penunjang belajar serta media pendidikan lainnya.

Menyisihkan masalah tenaga, mulai tahun 1983/1984 disiapkan dan dilaksanakan penataran guru, penilik pengawas, pembina dan pengelola pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan. (ton)

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Ditekankan Segi Afektifnya

Jakarta, Kompas

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dimaksudkan sebagai unsur pembinaan mental bangsa. Materi yang digunakan, mengambil peristiwa-peristiwa sejak 17 Agustus 1945 hingga kini. Karenanya, dalam pelajaran ini harus ditekankan segi-segi afektifnya. Sebagai buku teks digunakan buku 30 Tahun Indonesia Merdeka.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Nugroho Notosusanto mengemukakan hal ini ketika meresmikan penataran instruktur dalam bidang PSPB, Selasa kemarin di Jakarta.

Dikemukakan, dalam buku teks itu PSPB dapat diungkapkan secara *pictorial*. Dengan demikian

apa yang tercantum dalam buku itu bisa menjadi sumber penghayatan bagi anak-anak yang tidak mengalaminya. "Bahkan saya mendengar, buku 30 Tahun Indonesia Merdeka ini sudah disedehankan untuk konsumsi anak-anak Sekolah Dasar," kata menteri.

Hubungan Ditambahkan, hubungan antara sejarah nasional yang mencakup seluruh perjuangan sejak jaman prasejarah hingga menjelang proklamasi, harus menyumbang dengan PSPB. Jadi PSPB secara tidak langsung akan mencakup zaman prasejarah sampai dengan pendudukan Jepang.

"Untuk itu, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa harus diberi jam-jam tertentu secara khusus," tambahnya.

Dikemukakan, dalam penyajian PSPB ini akan lebih menarik bila dibantu dengan diorama yang terdapat dalam museum-museum. Akan tetapi, belum semua museum yang ada di seluruh pelosok tanah air ini mempunyai diorama. Selain itu, untuk membuat diorama juga memakan biaya yang tidak sedikit.

Untuk sementara, pada museum-museum propinsi akan diganti dengan foto transparan yang memuat gambar-gambar peristiwa penting. Diharapkan pula agar dalam setiap museum disediakan ruang khusus yang mendukung PSPB ini.

"Walaupun demikian, yang terpenting dari Sejarah Perjuangan

"Lebih khusus lagi, saya juga mohon agar sejarah yang diwariskan nanti, khususnya menyangkut sejarah para pembesar semesta yaitu dengan mengungkapkannya dan siapa yang mententah. Namun yang penting mengungkap segi-segi kerakyatan. Masalah interpretasi ini nanti harus dibicarakan oleh para ahli," katanya. Dikemukakan pula, dimasukkan IPS juga merupakan kekeliruan fundamental. Sejarah seharusnya dianggap sebagai pengetahuan dan inspirasi. Pengertian sejarah lebih luas dari pengetahuan sosial. Sebab, di dalamnya terkandung pelajaran sosial, ilmu bumi, etnologi, politik dan sebagainya. Jadi bukan sebaliknya, sejarah bukannya merupakan unsur ilmu bumi, etnologi dan politik. (ton)

Bangsa adalah penyajiannya. Yang mengunggulkan kisah-kisah sejarah yang bukan cerita, sudah selalu senang pada cerita, karena pada hakikatnya Sejarah Perjuangan Bangsa ini menyangkut manusia. "Ini harus ditekankan guna membangkitkan gairah untuk membangkitkan. Lewat cerita itu pula dimasukkan aspek moralnya," tambah menteri. Konsepnya Ditambahkan, sejarah selalu mempunyai konsep, fakta dan data. Hanya saja masalah interpretasi bisa berbeda, bergantung dari titik pandang yang digunakan. Untuk PSPB ini digunakan titik pandang tertentu yaitu Pancasila.

Keluhan Problematis Guru PSPB

Oleh PJ Suwarno

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Salah satu keluhan yang sering dialami guru PSPB adalah masalah konsep diri. Guru PSPB sering merasa rendah diri, kurang percaya diri, dan merasa tidak mampu dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengalaman, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya dukungan dari lingkungan. Akibatnya, guru PSPB sering merasa frustrasi dan stres dalam menjalankan tugasnya.

Masalah konsep diri
Guru PSPB sering merasa rendah diri, kurang percaya diri, dan merasa tidak mampu dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengalaman, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya dukungan dari lingkungan. Akibatnya, guru PSPB sering merasa frustrasi dan stres dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu keluhan yang sering dialami guru PSPB adalah masalah gaya hidup. Guru PSPB sering merasa bahwa gaya hidupnya kurang sehat, kurang teratur, dan kurang produktif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya waktu untuk berolahraga, kurangnya waktu untuk istirahat, dan kurangnya waktu untuk belajar. Akibatnya, guru PSPB sering merasa lelah, stres, dan kurang produktif dalam menjalankan tugasnya.

Gaya hidup
Guru PSPB sering merasa bahwa gaya hidupnya kurang sehat, kurang teratur, dan kurang produktif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya waktu untuk berolahraga, kurangnya waktu untuk istirahat, dan kurangnya waktu untuk belajar. Akibatnya, guru PSPB sering merasa lelah, stres, dan kurang produktif dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu keluhan yang sering dialami guru PSPB adalah masalah kesehatan. Guru PSPB sering merasa bahwa kesehatannya kurang baik, sering sakit, dan merasa lelah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya waktu untuk berolahraga, kurangnya waktu untuk istirahat, dan kurangnya waktu untuk belajar. Akibatnya, guru PSPB sering merasa lelah, stres, dan kurang produktif dalam menjalankan tugasnya.

Kesehatan
Guru PSPB sering merasa bahwa kesehatannya kurang baik, sering sakit, dan merasa lelah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya waktu untuk berolahraga, kurangnya waktu untuk istirahat, dan kurangnya waktu untuk belajar. Akibatnya, guru PSPB sering merasa lelah, stres, dan kurang produktif dalam menjalankan tugasnya.

JUMAT, 16 SEPTEMBER 1983

Bahan dan Metode Pengajaran Baru Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

Jakarta, Kompas
Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) secara resmi akan dimulai tahun ajaran 1984/1985. Di dalamnya tercakup bahan dan metode pengajaran yang baru, sebagai pengganti pelajaran sejarah Indonesia yang selama ini masih digunakan.

Sejauh ini akan dilakukan uji coba sekaligus mengadakan penataran guru dari TK sampai SMTA se-Indonesia. Dicanakan buku guru yang baru itu bisa disebar luaskan mulai 4 Oktober mendatang. Demikian keterangan sumber Kompas pada Depdikbud, Kamis kemarin.

Saat ini buku pelajaran PSPB tengah dalam proses pencetakan setelah mengalami penyederhanaan bahasa. Dengan demikian bahan yang disajikan bisa dipahami oleh setiap guru, kota maupun di daerah.

"Penyederhanaan dilakukan oleh ahli bahasa. Dan masalah penyebaran masih merupakan rencana, diharapkan juga bisa terlaksana sebagaimana mestinya," ungkap sumber tadi.

masalah utamanya bisa teratasi," tuturnya.

Dalam metode spiral bahan pelajaran akan mulai dari daerah dulu disertai dengan penampilan beberapa nama tokoh pahlawan. Kepada guru, selama penataran, akan diberikan bekal bagaimana menyeleksi sejumlah nama tokoh pahlawan yang akan ditampilkan. "Ini merupakan inti dari metode itu sendiri," kata sumber itu.

Usaha pendekatan lewat metode ini, diharapkan mempunyai dampak yang lebih luas bagi anak didik setempat. Terutama dalam memilih tokoh-tokoh yang bisa ditampilkan kepada anak didik. Dari keadaan ini sangat diharapkan, anak didik mempunyai rasa keterlibatan nasional, walau dalam daerahnya tidak pernah ada tokoh pejuang.

"Contoh yang paling gampang yaitu kasus ditembaknya pesawat penumpang milik Korea Selatan. Kita tidak mengalami, tetapi kita merasa ikut terlibat dan ikut merasakan apa yang menjadi keprihatinan mereka," tambahnya.

Lewat penataran itu pula, akan disampaikan bagaimana usaha mengembangkan dan mengolah, sehingga anak didik merasa tertarik dan mampu memberikan tanggapan yang aktif dan total terhadap tantangan yang diperoleh dari sejarah.

Membosankan
Sejauh ini pelajaran sejarah memang terasa membosankan. Pelajaran yang diberikan tidak lebih dari menghafal nama dan tahun semata. Sehingga kurang teras perbedaannya tingkat ajaran yang harus diberikan kepada anak SD sampai SMTA.

Melihat keadaan ini, Prof Dr Nugroho Notokusanto ketika diangkat sebagai Mendikbud bertekad mengubah pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah seharusnya tidak hanya mengandalkan segi kognitif semata tetapi lebih kepada afektif. Karena itulah, kepada Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk segera mengadakan revisi buku pelajaran sejarah. (ton)

106

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180
Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 2239B/UN39.12/KM/2018

30 Mei 2018

Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian
untuk Penulisan Skripsi

Yth. Kepala SMA Labschool Rawamangun
Jl. Pemuda Komp.UNJ, Rawamangun,
Jakarta 13220

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

N a m a : Zuhra
Nomor Registrasi : 4415143906
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 085887960273

Untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

"Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa : Pengalaman Guru Bidang Studi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Tahun 1986-1994"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Koordinator Prodi Pendidikan Sejarah

107

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180
Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : **2147A/UN39.12/KM/2018** **21 Mei 2018**
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Mengadakan Penelitian**
untuk Penulisan Skripsi

Yth. Kepala SMA Negeri 78 Jakarta
Jl. Bhakti IV/1 Komp. Pajak Kebun Jeruk
Kemanggisan, Jakarta Barat 11480

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : **Zuhra**
Nomor Registrasi : **4415143906**
Program Studi : **Pendidikan Sejarah**
Fakultas : **Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta**
No. Telp/HP : **085887960273**

Untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

"Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa : Pengalaman Guru Bidang Studi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Tahun 1986-1994"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Koordinator Prodi Pendidikan Sejarah

SH
NIP. 196504081985102001

